

Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparatur Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa

Eldi

Email : Email: eldiypup@gmail.com

Dosen Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

Nur Wahda Hijriyah Haiqal

Mahasiswa Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Author : Eldi. Tel./Hp.081354888676

Email: eldiypup@gmail.com

*Received : 22 September 2022, Revised: 20 Oktober 2022, Accepted: 29 Oktober 2022
Published : 30 Oktober 2022*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner dengan menggunakan teknik sampel jenuh (sensus). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa yang berjumlah 34 orang, sedangkan sampel yang diambil jumlah pengamatan adalah 34 orang. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur, akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur

Kata Kunci: Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Publik, Kinerja Aparatur

Abstract. This study aims to test and analyze the effect of budget participation and public accountability on the performance of the apparatus in the Gowa District Financial and Asset Management Agency. Data collection used primary data obtained from filling out questionnaires using saturated sample techniques (census). The population in this study was the entire State Civil Apparatus (ASN) working at the Gowa Regency Regional Financial and Asset Management Agency which amounted to 34 people, while the sample taken by the number of observations was 34 people. The data obtained were analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that budget participation has a positive and significant effect on the performance of the apparatus, public accountability has a positive and significant effect on the performance of the apparatus

Keywords: Budget Participation, Public Accountability, Apparatus Performance

I. PENDAHULUAN

Pemerintah selalu dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena sehubungan dengan adanya tanggung jawab yang telah diamanahkan masyarakat kepadanya. Untuk memberikan pelayanan yang baik maka pemerintah diharapkan lebih intensif dan optimal dalam meningkatkan kinerjanya. Kinerja merupakan kontribusi dalam bentuk pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga atau instansi tempat mereka bekerja. Kinerja pada hakekatnya berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Setiap pejabat publik diwajibkan untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya (Widodo, 2007). Kinerja suatu organisasi sangat penting, karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat dan akan dapat diketahui seberapa jauh tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal (Sadat, 2019). Pengukuran kinerja digunakan untuk sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yakni untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Nordiawan & Hertianti, 2018).

Mahsun (2017), kinerja aparatur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan aparatur pemerintah. Setiap organisasi memerlukan sistem pengukuran kinerja aparatur untuk menilai pencapaian organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja aparatur pemerintah pada era reformasi dan otonomi daerah disinyalir masih relatif rendah dan belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pilihan publik, ketika melaksanakan tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab, terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Widodo, 2007). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah Kabupaten Gowa melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “tata kelola pemerintah yang baik” bermakna sebagai kondisi pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis. Dengan demikian faktor partisipasi dan akuntabilitas turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja aparatur adalah partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik.

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses partisipasi individu dalam perilaku, pekerjaan, dan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai yang nantinya akan dievaluasi dan mungkin diberi penghargaan berdasarkan prestasi yang telah mereka tunjukkan dalam mencapai sasaran (Rudianto, 2016). Substansi partisipatif anggaran, diharapkan kinerja unit kerja organisasi akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan/standar yang dirancang secara partisipatif disetujui oleh pimpinan, maka aparatur akan bersungguh-sungguh dalam tujuan/standar yang telah ditetapkan dan aparatur juga memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Widodo (2007) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas aparatur pemerintah menjadi penting dan berdampak pada kinerja pemerintah. Aparatur pemerintah yang akuntabel niscaya kinerjanya akan dinilai baik.

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian Laksana (2018), menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Asrini (2019), mengemukakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja aparatur dan akuntabilitas publik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja aparatur. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujana (2019), yang membuktikan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur, akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Dan penelitian Yanida (2018), yang membuktikan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur dan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur. Bukti tersebut didukung oleh penelitian Firdiansyah (2019), mengemukakan partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur. Ketidaksamaan temuan dalam menjelaskan pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur, menjadi alasan peneliti untuk memilih variabel partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik dan pengaruhnya terhadap kinerja aparatur.

II. LITERATUR REVIEW

1. Partisipasi Anggaran

Bastian (2015) menjelaskan partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Unit SKPD (masing-masing instansi/dinas/sektor) membuat usulan-usulan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian, Kepala Bagian menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Daerah, kemudian kepala Daerah bersama DPRD membahas anggaran tersebut, hasil dari pembahasan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai anggaran yang tentunya dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Brownel (1986) dalam Firdiansyah (2019), partisipasi anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Partisipasi anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan nantinya bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sujana (2019) menjelaskan partisipasi anggaran merupakan ciri dari anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparatur untuk mempertanggung jawabkan proses anggaran.

Menurut Rudianto (2016:75), partisipasi anggaran merupakan suatu proses partisipasi individu dalam perilaku, pekerjaan, dan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai yang nantinya akan dievaluasi dan mungkin diberi penghargaan berdasarkan prestasi yang telah

mereka tunjukkan dalam mencapai sasaran. Partisipasi anggaran diukur dengan indikator yaitu: (a) Keterlibatan yaitu seberapa besar keterlibatan para pegawai dalam proses penyusunan anggaran, (b) Pengaruh yaitu besarnya pengaruh usulan atasan dalam anggaran, (c) Komitmen yaitu seberapa besar atasan mempunyai kontribusi penting terhadap anggaran.

2. Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2016) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya (Halim, 2015). Kemudian menurut Bappenas & Depdagri (2015), tentang Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Menurut Mardiasmo (2016), bentuk akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: (a) Akuntabilitas vertikal (internal) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. (b) Akuntabilitas horisontal (eksternal) yaitu akuntabilitas kepada publik atau masyarakat secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. Lebih lanjut Mardiasmo (2016) jenis akuntabilitas publik terdiri dari (a) akuntabilitas hukum dan kejujuran, (b) akuntabilitas proses, (c) akuntabilitas program, dan (d) akuntabilitas kebijakan.

III.

3. Kinerja Aparatur

Suatu pemerintah yang modern dituntut untuk mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas pemerintahan itu sendiri sehingga dalam pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara sepihak dimana masyarakatpun harus diberdayakan (Ibrahim, 2016). Menurut Mangkunegara (2016), kinerja aparatur adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Menurut Jalil (2014), kinerja aparatur adalah suatu penentuan penetapan standar dari kinerja aktivitas aparatur yang dilakukan setiap hari berdasarkan proses masukan (*input*), proses keluaran (*output*), penanganan (*outcome*) dan keuntungan (*benefit*) dalam menghasilkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, sebagai bentuk manifestasi kinerja aparatur dalam menjalankan tugas yang optimal. Kinerja aparatur

adalah terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja” atau prestasi”. Kinerja aparatur menunjukkan pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas (Keban dan Yermias 2015). Pengukuran / penilaian kinerja aparatur merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Halim (2015:774), pengukuran kinerja aparatur dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mahsun (2017:25), kinerja aparatur diukur dengan indikator indikator yaitu: (a) Tujuan (*goal*) merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. (b) Standar (*standart*) merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. (c) Umpan balik (*feedback*) merupakan masukan yang telah digunakan untuk mengukur pada kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. (d) Alat atau sarana (*mean*) merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. (e) Kompetensi (*competence*) merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. (f) Motif (*motive*) merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu peluang. (g) Peluang (*opportunity*) merupakan pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya

4. Hipotesis

- H1: Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa.
- H2: Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa.

III. METODELOGI

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa yang berjumlah 34 orang. Seperti pada tabel berikut:

Tabel 1 Daftar Populasi

No.	Bagian-Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa	Jumlah Populasi
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	9
5	Kepala Sub Bagian	4
6	Staf Ahli	15
Jumlah Populasi		34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa, 2021

Teknik penarikan sampel menggunakan sampel jenuh (sensus), dimana seluruh populasi dijadikan sampel berjumlah 34 orang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung seperti dengan cara mendatangi responden (Aparatur Sipil Negara / ASN), serta secara tidak langsung melalui perantara kepada responden pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sebanyak 34 rangkap dan kuesioner yang kembali sebanyak 34 rangkap.

3. Variabel dan Pengukurannya

Tabel 2 : Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber Referensi
Partisipasi Anggaran (X1)	1. Keterlibatan 2. Pengaruh 3. Komitmen	Ordinal	Rudianto (2016)
Akuntabilitas Publik (X2)	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan	Ordinal	Mardiasmo (2016)
Kinerja Aparatur (Y)	1. Tujuan (<i>goal</i>) 2. Standar (<i>standart</i>) 3. Umpan balik (<i>feedback</i>) 4. Alat atau sarana (<i>mean</i>) 5. Kompetensi (<i>competence</i>) 6. Motif (<i>motive</i>) 7. Peluang (<i>opportunity</i>)	Ordinal	Mahsun (2017:)

4. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis digunakan analisis regresi berganda, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja aparatur

a = Konstanta

b₁ - b₂ = Koefisien regresi (parameter)

X₁ = Partisipasi anggaran

X₂ = Akuntabilitas publik

e = Variabel pengganggu (*Standar error*)

5. Hasil

Analisis statistik inferensial yang digunakan untuk menjawab masalah dan sekaligus menguji hipotesis. Analisis statistik inferensial dilakukan dengan menggunakan alat statistik regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur. Hasil analisis dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Hasil Analisis

Model	Koefisien Regresi	t- hitung	p-value (sig)
Constant	13,690	1,980	0,057
Partisipasi anggaran	0,493	2,322	0,027
Akuntabilitas Publik	0,747	2,840	0,007

Sumber : Data diolah tahun 2022

IV. PEMBAHASAN

a. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparatur

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur. Positif terlihat dari koefisien regresi sebesar 0,493, nilai t hitung sebesar 2,322 > ttabel sebesar 2,037 dan signifikan yang dilihat dari signifikansi (0,027) lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar 5% (0,05). Pengaruh positif menunjukkan bahwa partisipasi anggaran sejalan dengan kinerja aparatur, jika partisipasi anggaran tinggi maka kinerja aparatur yang dihasilkannya akan tinggi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran juga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa.

Kinerja aparatur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan aparatur pemerintah. Setiap organisasi memerlukan sistem pengukuran kinerja aparatur untuk menilai pencapaian organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan. Faktor lain yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja aparatur adalah partisipasi anggaran dan akuntabilitas public (Mahsun,2017).

Dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Sujana (2019) yang menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur.

b. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur. Positif terlihat dari koefisien regresi sebesar 0,747, nilai t hitung sebesar 2,890 > ttabel sebesar 2,037 dan signifikan yang dilihat dari signifikansi (0,007) lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar 5% (0,05). Pengaruh positif menunjukkan bahwa akuntabilitas publik sejalan dengan kinerja aparatur, jika akuntabilitas publik tinggi maka kinerja aparatur yang dihasilkannya akan tinggi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa

akuntabilitas publik juga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Yanida (2018) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:
(1) Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Hal ini berarti bahwa ketika partisipasi anggaran tinggi maka kinerja aparatur yang dihasilkannya akan tinggi.
(2) Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas publik memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparatur.

REFERENSI

- Agung. (2019). *Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Kabupaten Batang*. Accounting Analysis Jurnal.3 (2). Alfabeta.
- Asrini. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Pemerintah Kota Palu*. Jurnal Ekonomi.20 (3).
- Asrini. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Pemerintah Kota Palu*. Jurnal Ekonomi.20 (3).
- Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). (2015). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.
- Bappenas & Depdagri. (2015). *tentang Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Jakarta.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit Erlanggan. Fakultas Ekonomi Universitas Gaja Mada.
- Beby. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan*. Jurnal Ekonomi.2 (4).
- Deviyanti. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Kabupaten Buleleng*. Jurnal Fakultas Ekonomi.2 (1).

Ekonomi Universitas Gaja Mada.

- Firdiansyah. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.11 (2) 611-628.
- Firdiansyah. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.11 (2) 611-628.
- Ghozali, Imam. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*.
- Ibrahim, Amin. (2016). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implikasinya*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Jalaluddin. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Kota Banda Ace*. Jurnal Fakultas Ekonomi.2 (1).
- Jalil, A. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*, Terjemahan oleh G.A. Ticoalu. Jakarta : Bumi Aksara.
- Keban dan Yeremias T. (2015). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Bandung : Penerbit Gava Media.
- Laksana. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Batang*. Accounting Analysis Jurnal.3 (2).
- Laksana. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Batang*. Accounting Analysis Jurnal.3 (2).
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2014. *tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mahsun, Mohamad. (2017). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mangkunegara, A. Anwar Prabu. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Badung : Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddi & Hertianti, Ayuningtyas, 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, Eidis 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Bupati Nomor : Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa 2020 – 2025
- Puja. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya*. Accounting Analysis Jurnal.5 (2).

- Rudianto. (2016). *Penganggaran*. Jakarta : Erlangga.
- Sadat, Anuar, 2019, Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Medan Denai, Jurnal Taushiah FAI-UISU, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2019, pp 14-19.
- Setiawan, H.P, 2015. *Manajemen Strategi Lembaga*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Silmian. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri*. Jurnal Fakultas Ekonomi.2 (1).
- Sujana, Edy. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng*. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha.2 (1).
- Sulung. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Kabupaten Batang*. Jurnal Ekonomi. 9 (1).
- Suyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Edisi I1, BPFE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Widodo, Joko, 2007, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Penerbit Bayu Media, Malang
- Winarno, Surakhmad. (2017). *Metode dan Teknik Akuntabilitas*. Bandung : Tarsito.
- Yanida. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Kota Padang*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.4 (3).
- Yanida. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparatur pada SKPD Kota Padang*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.4 (3).